

## **BAB II**

### **TEORI *STAKEHOLDER*, TEORI LEGITIMASI, TEORI AGENSI, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Teori *Stakeholder***

Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (Madona dan Khafid, 2020). Teori *stakeholder* mengakui bahwa terdapat sejumlah *stakeholder* dalam masyarakat yang berinteraksi dengan cara yang dinamis dan kompleks (Kusumawardani, 2022). Teori *stakeholder* menjelaskan tentang bagaimana manajemen perusahaan memenuhi atau mengelola harapan para *stakeholder*. Oleh karena itu, supaya pengelolaan perusahaan berjalan dengan baik maka perusahaan perlu menerapkan salah satu prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi.

Dengan pemenuhan prinsip tersebut, perusahaan diharapkan mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan itu sendiri. Nilai tambah ini yang mampu memunculkan perhatian lebih kepada pemangku kepentingan sehingga perusahaan perlu untuk menjaga hubungan baik kepada mereka. Demi menjaga hubungan baik serta memenuhi harapan dan kepentingan pemangku kepentingan maka perusahaan perlu untuk menyediakan keterbukaan informasi seperti pengungkapan *sustainability report* sehingga perusahaan mampu mempertahankan eksistensinya dan juga bermanfaat bagi *stakeholder* dalam pengambilan keputusan (Madona dan Khafid, 2020). Pengungkapan *sustainability report* sangat diperlukan

supaya pemangku kepentingan mengetahui segala bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan (Tobing *et al.*, 2019).

## **2.2. Teori Legitimasi**

Perusahaan yang hendak berkembang secara berkelanjutan haruslah memperoleh izin dan keberpihakan masyarakat, sebagai pemilik sumber daya yang akan digunakan oleh perusahaan (Kusumawardani, 2022). Perusahaan akan terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan norma yang ada di masyarakat serta memastikan bahwa aktivitas mereka dapat diterima oleh pihak luar dengan cara yang sah (Madona dan Khafid, 2020).

Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengelolaan yang mengedepankan keberpihakan dan sesuai dengan harapan masyarakat demi meningkatkan citra perusahaan sehingga perusahaan dapat mengungkapkan *sustainability report* sebagai alat yang mewujudkan legitimasi. Laporan berkelanjutan ini memberikan transparansi mengenai aktivitas perusahaan dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar.

## **2.3. Teori Agensi**

Dalam teori keagenan terdapat hubungan antara praktik tata kelola perusahaan dengan praktik pengungkapan perusahaan. Praktik tata kelola yang baik akan memperkuat pengendalian internal perusahaan dalam hal perlindungan lingkungan, mengurangi perilaku oportunistik manajemen dan asimetri informasi, serta

meningkatkan kualitas pelaporan. Dari perspektif teori keagenan menggambarkan potensi konflik terjadi ketika agen dan prinsipal mempunyai tujuan yang berbeda. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya asimetri informasi yang dikarenakan pihak manajer perusahaan lebih memiliki informasi mengenai prospek dan risiko perusahaan di masa depan dibandingkan dengan pemegang saham, perilaku oportunistik manajer, dan konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham (Chairina dan Tjahjadi, 2023). Teori keagenan menyatakan bahwa manajemen mempunyai insentif untuk memanipulasi kinerja perusahaan demi keuntungan pribadinya (Alomran dan Alsahali, 2023).

Pada hakikatnya konflik kepentingan dapat menimbulkan masalah karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Prinsipal memiliki kepentingan untuk memaksimalkan laba mereka, sedangkan agen juga menginginkan untuk mendapatkan kompensasi dengan kemungkinan adanya manajemen laba. Konflik keagenan akan lebih rentan terjadi pada perusahaan yang membedakan antara fungsi pemilik dan manajer sehingga perusahaan perlu menerapkan tata kelola yang baik. Manajer perlu mengungkapkan *sustainability report* untuk menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* sehingga harapannya dapat memperkecil konflik kepentingan antara agen dan prinsipal (Devi dan Khafid, 2021).

## **2.4. Corporate Governance**

### **2.4.1. Definisi Corporate Governance**

*Organization Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan bahwa *corporate governance* merupakan struktur hubungan serta kaitannya dengan tanggung jawab di antara pihak-pihak terkait yang terdiri atas pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer, yang memiliki tujuan untuk mendorong terciptanya kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan utama perusahaan (Demise, 2006). *Corporate governance* merupakan seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal, sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka, atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2000).

Dari definisi tersebut maka perusahaan dengan penerapan GCG tentunya akan memiliki kemungkinan yang besar untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial untuk kepentingan pemangku kepentingannya. Hal ini disebabkan karena kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh dukungan dan kepercayaan daripada pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini, *corporate governance* yang digunakan peneliti adalah dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional.

### **2.4.2. Dewan Komisaris Independen**

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan

yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Madona dan Khafid, 2020). Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait.

Dalam penelitian ini, dewan komisaris independen akan diukur dengan menggunakan proporsi komisaris independen. Proporsi komisaris independen merupakan rasio antara jumlah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan terhadap jumlah seluruh dewan komisaris (Madona dan Khafid, 2020). Semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam melindungi seluruh pemangku kepentingan dan tetap mengutamakan perusahaan akan semakin objektif.

#### **2.4.3. Komite Audit**

Komite audit merupakan komite yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penghubung antara dewan direksi, auditor eksternal, auditor internal, serta anggota independen (Aliniar dan Wahyuni, 2017). Komite audit memiliki tanggung jawab tugas pada dewan komisaris untuk mengawasi proses pelaporan yang dilakukan manajemen. Komite audit dalam membahas permasalahan yang ada di internal perusahaan perlu mengadakan pertemuan secara berkala (Devi dan Khafid, 2021).

Dalam penelitian ini, komite audit akan diukur dengan menggunakan jumlah rapat audit dalam satu tahun. Dengan hal ini, semakin sering rapat komite audit dilakukan maka koordinasi komite audit akan semakin baik sehingga dapat melaksanakan pengawasan terhadap manajemen dengan lebih efektif dan

diharapkan dapat mendukung peningkatan publikasi informasi sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan (Tobing *et al.*, 2019).

#### **2.4.4. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan banyaknya pihak lembaga eksternal yang memiliki saham di perusahaan (Devi dan Khafid, 2021). Kepemilikan institusional menjadi hal penting bagi manajemen perusahaan untuk melakukan transparansi atas pengungkapan informasi yang di dalamnya berisi tindakan yang telah dilakukan untuk menjaga kondisi perusahaan dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional akan diukur dengan menggunakan rasio kepemilikan institusional. Rasio tersebut merupakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki investor institusional terhadap jumlah saham beredar perusahaan. Besarnya kepemilikan institusional mampu memengaruhi pengendalian investor kepada manajemen agar mengungkapkan informasi secara lebih transparan. Oleh karena itu, proporsi investor institusional mampu memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan.

### **2.5. Kinerja Keuangan**

#### **2.5.1. Definisi Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu (Rudianto, 2013). Kinerja keuangan ini dipakai oleh manajemen sebagai salah satu pedoman untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Manajemen yang sadar dan peduli secara sosial juga akan memiliki keterampilan yang

diperlukan untuk menjalankan perusahaan yang unggul dalam kinerja keuangan sehingga membuat perusahaannya menjadi investasi yang menarik bagi investor (Kusumawardani, 2022).

Terdapat alat-alat analisis kinerja keuangan yang dibutuhkan, yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan data keuangan yang terdapat pada laporan keuangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio profitabilitas dan *leverage*.

### **2.5.2. Profitabilitas**

Tujuan didirikannya perusahaan salah satunya adalah untuk memperoleh profit atau laba. Rasio profitabilitas mencerminkan kehandalan suatu organisasi dalam menciptakan profit berdasarkan aktivitas normal bisnisnya (Devi dan Khafid, 2021). Seiring meningkatnya laba maka suatu organisasi akan memiliki sumber modal untuk menjalankan kegiatan sosial kepada masyarakat maupun lingkungan sebagai tanggung jawab perusahaan. Sehingga, kegiatan tersebut harus diinformasikan dan diungkapkan kepada para pemangku kepentingan perusahaan melalui pengungkapan *sustainability report*.

Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang akan digunakan adalah *Return on Assets* (ROA). ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui tingkat aset yang dimilikinya. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan melalui setiap rupiah yang terdapat dalam komponen aset.

### **2.5.3. Leverage**

*Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar operasional perusahaan dibiayai dengan utang (Tobing *et al.*, 2019). Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk ke dalam kategori *extreme leverage*, yaitu perusahaan terjebak dalam utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut (Fahmi, 2014).

Dalam penelitian ini, rasio leverage perusahaan yang akan digunakan adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). DER mengukur tingkat leverage perusahaan. Artinya, semakin tinggi rasio DER maka menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko yang ditanggung oleh perusahaan.

### **2.6. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya aktivitas operasional di dalam perusahaan (Devi dan Khafid, 2021). Perusahaan besar memiliki kemampuan berproduksi pada skala ekonomis, akibatnya produk yang dihasilkan memiliki harga satuan yang rendah. Harga satuan yang rendah tersebut membuat perusahaan memiliki daya saing yang tinggi di pasaran. Akibatnya terjadi peningkatan penjualan perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan laba/keuntungan perusahaan.

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan akan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan. Ukuran perusahaan ditentukan dari jumlah aset yang dimiliki perusahaan, jadi sudah tentu apabila menginginkan luas



pengungkapan informasi laporan keuangan, biaya yang dikeluarkan juga harus sebanding (Kusumawardani, 2022).

## **2.7. Sustainability Report**

### **2.7.1. Definisi Sustainability Report**

Berdasarkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017, *sustainability report* merupakan laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu LJK, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. *Sustainability report* ini dibuat untuk menunjukkan komitmen organisasi dalam upaya pembangunan berkelanjutan serta untuk membandingkan kinerja organisasi dari waktu ke waktu.

Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik wajib melaporkan laporan keberlanjutan dalam aktivitas operasional LJK, emiten, dan perusahaan publik (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P, yaitu *profit, people, and planet*. *Profit* untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, *people* untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan masyarakat, dan *planet* untuk menjaga dan meningkatkan kualitas alam serta lingkungan di tempat perusahaan tersebut beroperasi (Dewi dan Ramantha, 2021).

### 2.7.2. Aspek Pengungkapan *Sustainability Report*

Pengungkapan standar dalam *sustainability report* menurut Standar GRI 2016 terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

1. Pengungkapan umum

Menyangkut profil organisasi, strategi, etika dan integritas, tata kelola keterlibatan pemangku kepentingan, dan praktik pelaporan.

2. Pendekatan manajemen

Menyangkut penjelasan topik material dan batasannya, pendekatan manajemen dan komponennya, dan evaluasi pendekatan manajemen.

3. Ekonomi

Menyangkut kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dampak ekonomi tidak langsung, praktik pengadaan, anti korupsi, dan perilaku anti persaingan.

4. Lingkungan

Menyangkut material, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, air limbah dan limbah, kepatuhan lingkungan, dan penilaian lingkungan pemasok.

5. Sosial

Menyangkut kepegawaian, hubungan tenaga kerja/manajemen, kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan dan pendidikan, keanekaragaman dan kesempatan setara, non diskriminasi, kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, pekerja anak, kerja paksa atau wajib kerja, praktik keamanan, hak-hak masyarakat adat, penilaian hak asasi manusia, masyarakat lokal, penilaian sosial pemasok, kebijakan publik, kesehatan dan keselamatan

pelanggan, pemasaran dan pelabelan, privasi pelanggan, dan kepatuhan sosial ekonomi.

### **2.7.3. Pengukuran *Sustainability Report***

Pengukuran didasarkan pada Standar GRI 2016 sebagai pedoman dalam pengukuran pengungkapan *sustainability report* yang kemudian akan dihitung menggunakan *Sustainability Report Disclosure Index*. Standar GRI 2016 merupakan standar yang digunakan untuk membantu perusahaan pada komitmen keberlanjutan dalam mencapai kinerja *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang efektif. Standar GRI 2016 mencakup standar mengenai pelaporan informasi tentang lingkungan, sosial, dan kinerja keuangan. Standar ini menekankan aspek tanggung jawab sosial pada tingkat organisasi seperti keselamatan kerja, hak asasi manusia, dan perlakuan adil terhadap pekerja. Dalam standar ini, pelapor perlu mengidentifikasi tujuan ESG dan menetapkan target yang dicapai.

Perhitungan SRDI dilakukan dengan memberikan skor 1 apabila suatu item diungkapkan dan skor 0 apabila tidak diungkapkan. Setelah dilakukan pemberian skor pada semua item, skor tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total skor pada setiap perusahaan. Jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan akan dibagi dengan jumlah item yang seharusnya terdapat dalam *sustainability report*.

## **2.8. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menguji pengaruh *Corporate Governance* dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang

terdaftar di BEI tahun 2012-2014 (Adila & Syofyan, 2016). *Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris independen dan komite audit, sedangkan karakteristik perusahaan yang digunakan adalah profitabilitas yang diproksikan dengan ROA dan ukuran perusahaan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian terdahulu menguji pengaruh mekanisme GCG dan ukuran perusahaan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan terdaftar di BEI (Aliniar dan Wahyuni, 2017). GCG yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, dan kepemilikan institusional, dan kepemilikan saham terkonsentrasi. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan saham terkonsentrasi, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan proporsi komisaris independen dan kepemilikan saham institusional berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian terdahulu menguji pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan, dan GCG terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar dalam BEI (Tobing *et al.*, 2019).

Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2015-2017. GCG yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite audit dan dewan komisaris independen, sedangkan kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas dan *leverage*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan untuk *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), komite audit, dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI.

Penelitian terdahulu menguji pengaruh GCG terhadap pengungkapan *sustainability report* dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi (Madona dan Khafid, 2020). GCG yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Hasil penelitian ini adalah proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Kemudian, ukuran perusahaan memoderasi secara signifikan proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh komite audit dan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian terdahulu menguji profitabilitas dalam memediasi pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report* (Devi dan Khafid, 2021). Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk kategori indeks LQ45 periode 2013-2017 sebanyak 70 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan tidak memengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Kemudian, kepemilikan institusional tidak memengaruhi profitabilitas, sedangkan komite audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas, namun ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Lalu, profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Kemudian, kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada pengungkapan *sustainability report* melalui profitabilitas, sedangkan profitabilitas mampu memediasi positif komite audit pada pengungkapan *sustainability report*, namun profitabilitas memediasi secara negatif ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian terdahulu menguji GCG, ukuran perusahaan, dan *sustainability report* dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi (Dewi dan Ramantha, 2021). Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI yang berjumlah 713 perusahaan. GCG yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh positif terhadap *sustainability report*, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *sustainability report*. Kemudian, kepemilikan institusional mampu

memoderasi pengaruh dewan direksi, komisaris independen, dan ukuran perusahaan pada *sustainability report*, namun tidak mampu memoderasi pengaruh komite audit pada *sustainability report*.

Penelitian terdahulu menguji pendorong akuntansi dan pelaporan keberlanjutan di negara berkembang: bukti dari Nigeria (Ikpor *et al.*, 2022). Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan di Nigeria yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria periode laporan keuangan 2015-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, internasionalitas, dan jenis auditor berpengaruh positif terhadap *sustainability report*, sedangkan struktur kepemilikan dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *sustainability report*.

Penelitian terdahulu menguji pengaruh GCG dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report* serta dampaknya terhadap *return* saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2020 (Kusumawardani, 2022). GCG yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan untuk ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Kemudian, untuk pengungkapan *sustainability report*, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *return* saham, sedangkan pengungkapan *sustainability report* dapat memediasi kepemilikan institusional

terhadap return saham, pengungkapan *sustainability report* dapat memediasi dewan komisaris independen terhadap return saham, pengungkapan *sustainability report* dapat memediasi komite audit terhadap return saham, dan pengungkapan *sustainability report* dapat memediasi ukuran perusahaan terhadap return saham.

Penelitian terdahulu yang menguji peran kepemilikan institusional jangka panjang dalam penjaminan laporan keberlanjutan: bukti global (Alomran dan Alsahali, 2023). Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan publik di seluruh dunia yang tersedia di *database* Thomson Reuters-ESG periode 2012-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional jangka panjang berhubungan positif terhadap keputusan jaminan keberlanjutan perusahaan. Selain itu, kepemilikan institusional jangka panjang dan keputusan jaminan keberlanjutan perusahaan dimoderasi secara negatif oleh kualitas tata kelola.

Penelitian terdahulu menguji kualitas laporan tata kelola hijau dan keberlanjutan: peran moderat komitmen keberlanjutan di negara-negara ASEAN (Chairina dan Tjahjadi, 2023). Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek ASEAN yang menerbitkan *sustainability report* dari tahun 2015-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi dewan, keragaman dewan, komitmen keberlanjutan, ukuran perusahaan, dan jenis industri berpengaruh terhadap kualitas *sustainability report*. Kemudian, ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kualitas *sustainability report*. Lalu, komite keberlanjutan tidak berpengaruh terhadap kualitas *sustainability report*.



## **2.9. Pengembangan Hipotesis**

### **2.9.1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen atau memiliki keterkaitan erat dengan perusahaan yang diharapkan dapat menciptakan keseimbangan kepentingan perusahaan dan *stakeholder* yang terlibat (Tobing *et al.*, 2019). Dewan komisaris bertujuan untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap kebijakan manajemen, mekanisme kepengurusan dan operasional perusahaan, serta menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang terkait. Komisaris independen juga diharapkan tidak terpengaruh oleh manajemen sehingga dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas.

Sesuai dengan teori *stakeholder*, perusahaan dalam beroperasi juga harus memberikan manfaat kepada pemangku kepentingannya. Semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka diindikasikan semakin kritis dan berdaya guna pengendalian yang dilaksanakan direksi. Selain itu, kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh pemangku kepentingan dan mengutamakan perusahaan akan semakin objektif. Hal inilah yang dapat memberikan kekuatan kepada dewan komisaris untuk menekan manajemen dalam meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Maka, keberadaan dewan komisaris independen sebagai bagian dari penerapan GCG akan mendorong kemungkinan perusahaan melakukan pengungkapan lebih untuk para *stakeholder*, salah satunya melalui pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* (Aliniar dan Wahyuni, 2017). Kemudian, penelitian lain menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *sustainability report* (Dewi dan Ramantha, 2021). Oleh karena itu, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> = Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

### **2.9.2. Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

Komite audit merupakan komite yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai penghubung antara dewan direksi, auditor eksternal, auditor internal, serta anggota independen (Aliniar dan Wahyuni, 2017). Komite audit bertugas untuk melakukan penelaahan atas informasi yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik/pihak otoritas (Madona dan Khafid, 2020). Komite audit akan menjalankan tugasnya dalam mengawasi kegiatan pelaporan yang dilakukan manajemen perusahaan sehingga komunikasi dan koordinasi antar anggota komite audit menjadi suatu keharusan dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya (Devi dan Khafid, 2021). Pengawasan secara mendalam dari komite audit mampu mendorong perusahaan untuk melakukan pengawasan yang lebih baik sehingga prinsip-prinsip GCG dapat terpenuhi, salah satunya prinsip transparansi yang mewajibkan perusahaan untuk terbuka atas segala aktivitas bisnis yang dilakukan dan kemudian melakukan pengungkapan *sustainability report*.

Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan akan secara sukarela mengungkapkan informasi mengenai kinerja lingkungan, sosial, dan intelektual mereka melebihi dan lebih dari permintaan wajibnya untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diharapkan oleh *stakeholder*. Semakin seringnya komite audit melakukan rapat maka akan semakin sering para anggota komite audit bertukar pikiran dan pengetahuan sehingga kemudian akan mendorong perusahaan untuk memutuskan mengenai tindakan yang harus diambil demi kepentingan seluruh *stakeholder*, salah satunya keputusan mengenai pengungkapan sosial perusahaan (Madona dan Khafid, 2020). Selain itu, berdasarkan teori agensi, dengan efektifnya fungsi komite audit maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan dapat diminimalisir (Fatchan dan Trisnawati, 2016). Oleh karena itu, melalui jumlah pertemuan yang sering dilakukan oleh komite audit maka akan memotivasi manajemen untuk melakukan praktik pengungkapan *sustainability report* sebagai alat komunikasi perusahaan dengan *stakeholder* dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan GCG. Penelitian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *sustainability report* (Dewi dan Ramantha, 2021). Oleh karena itu, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> = Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

### 2.9.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Kepemilikan institusional merupakan banyaknya pihak lembaga eksternal yang memiliki saham di perusahaan (Devi dan Khafid, 2021). Besarnya kepemilikan institusional mampu memengaruhi pengendalian investor kepada manajemen agar mengungkapkan *sustainability report*. Hal ini dikarenakan investor institusional memiliki kekuatan untuk melindungi haknya sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara transparan. Kepemilikan institusional menjadi hal penting bagi manajemen perusahaan untuk melakukan transparansi atas pengungkapan informasi yang di dalamnya berisi tindakan yang telah dilakukan untuk menjaga kondisi perusahaan dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Berdasarkan teori *stakeholder*, semakin besar kepemilikan institusional tentu akan mendorong perusahaan untuk lebih mengungkapkan laporan keberlanjutan sebagai tindakan peduli terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan serta untuk mengelola harapan pemangku kepentingan. Jadi, perusahaan memberikan manfaat tidak hanya kepada perusahaan saja melainkan kepada para pemangku kepentingan juga. Selain itu, menurut teori agensi, pengungkapan *sustainability report* dapat memperkecil ketidakseimbangan informasi antara agen dan pemilik. Besarnya jumlah kepemilikan institusional akan dapat memperbesar pengendalian investor terhadap perusahaan sehingga juga akan mendorong pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan oleh perusahaan. Pengungkapan *sustainability report* tersebut diharapkan akan memperkecil

ketidakseimbangan informasi antara agen dan *principal* (Madona dan Khafid, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan saham institusional berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report* (Aliniar dan Wahyuni, 2017). Oleh karena itu, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> = Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

#### **2.9.4. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

Profitabilitas mencerminkan kehandalan suatu organisasi dalam menciptakan profit berdasarkan aktivitas normal bisnisnya (Devi dan Khafid, 2021). Perusahaan yang hendak mencapai tujuannya, tentunya ingin terus bersaing dengan para pesaingnya guna memperoleh laba, hingga berbagai cara dan usaha dapat dilakukan oleh perusahaan supaya terwujud kinerja yang mampu membuahkan hasil yang maksimal. Seiring meningkatnya laba maka suatu organisasi akan memiliki sumber modal untuk menjalankan kegiatan sosial kepada masyarakat maupun lingkungan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Sehingga, kegiatan tersebut harus diinformasikan dan diungkapkan kepada para pemangku kepentingan perusahaan. *Sustainability report* merupakan contoh pengungkapan informasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder* untuk memenuhi kebutuhan informasi dan untuk meningkatkan dukungan dari para *stakeholder*

Sesuai dengan teori *stakeholder*, apabila pengelolaan perusahaan berjalan dengan baik tentunya akan mendorong kinerja keuangan perusahaan dan meningkatkan profitabilitas sehingga mampu menciptakan nilai tambah bagi

perusahaan itu sendiri. Nilai tambah ini yang mampu memunculkan perhatian lebih kepada pemangku kepentingan sehingga perusahaan perlu untuk menjaga hubungan baik kepada mereka seperti melakukan kegiatan sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Selain itu, sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan perlu melakukan pengelolaan yang mengedepankan keberpihakan dan sesuai dengan harapan masyarakat demi meningkatkan citra perusahaan dan keyakinan pada masyarakat. Apabila profitabilitas meningkat maka suatu organisasi akan memiliki sumber modal untuk menjalankan kegiatan sosial kepada masyarakat maupun lingkungan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan sehingga pengungkapan *sustainability report* akan lebih tinggi. *Sustainability report* ini dapat dilakukan dan diungkapkan dengan lebih luas karena perusahaan ingin membuktikan kinerja dan eksistensinya kepada pemangku kepentingan dan lingkungan sekitarnya. Penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Assets* (ROA) berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* (Tobing *et al.*, 2019). Oleh karena itu, berdasarkan kedua teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub> = Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

#### **2.9.5. Pengaruh *Leverage* terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

*Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar operasional perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk ke dalam kategori *extreme leverage*, yaitu perusahaan terjebak dalam utang yang tinggi dan sulit untuk

melepaskan beban utang tersebut (Fahmi, 2014). Suatu perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut sangat bergantung pada pinjaman untuk memperoleh sumber dananya, sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang rendah mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut lebih banyak mendanai dengan modal sendiri.

Sesuai dengan teori legitimasi, jika semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka semakin berpeluang besar untuk menimbulkan citra negatif dari masyarakat. Karena jika sebuah perusahaan memiliki banyak utang, masyarakat cenderung berpikir bahwa perusahaan tersebut tidak pandai dalam mengatur kinerja perusahaannya. Jika suatu perusahaan sudah memiliki banyak utang maka bagaimana mereka akan peduli terhadap lingkungan di sekitarnya, sedangkan untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan saja sulit. Hal ini juga sesuai dengan teori *stakeholder*, tingkat *leverage* yang tinggi dapat menurunkan tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan karena pemangku kepentingan lebih percaya untuk menginvestasikan uangnya pada perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik serta tetap menjaga lingkungan disekitarnya (Tobing *et al.*, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI (Tobing *et al.*, 2019). Oleh karena itu, berdasarkan kedua teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>5</sub> = *Leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

### **2.9.6. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya aktivitas operasional di dalam perusahaan (Devi dan Khafid, 2021). Ukuran perusahaan ditentukan dari jumlah aset yang dimiliki perusahaan, jadi apabila perusahaan menginginkan pengungkapan informasi yang lebih luas maka biaya yang dikeluarkan juga harus sebanding. Ukuran perusahaan sebagai salah satu karakteristik perusahaan yang turut menentukan tingkat kepercayaan investor membutuhkan kredibilitas yang baik sehingga perusahaan perlu melakukan sumbangsih dalam pertumbuhan sosial dan lingkungan sekitar (Madona dan Khafid, 2020).

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan yang ingin berkembang secara berkelanjutan haruslah memperoleh izin dan keberpihakan dari masyarakat, sebagai pemilik sumber daya yang akan digunakan perusahaan. Perusahaan besar memiliki konsekuensi lebih diperhatikan oleh publik seiring besarnya pengaruh perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan (Devi dan Khafid, 2021). Sehingga, perusahaan dengan ukuran yang semakin besar maka juga akan berdampak pada semakin banyaknya item yang harus diungkapkan pada pengungkapan *sustainability report* demi meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan dan kinerja perusahaan sudah sesuai dan tidak melanggar aturan yang berlaku (Devi dan Khafid, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* (Kusumawardani, 2022). Kemudian, penelitian lain menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* (Tobing *et al.*, 2019). Oleh karena itu,



berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>6</sub> = Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

